



Dari Sidang Korupsi Sapi Kelompok Pucang Sari Rendang Satu Terdakwa Hamil, Mestinya 85, Baru Ada 12 Ekor

Sidang lanjutan kasus korupsi sapi kelompok Pucang Sari, Rendang, Karangasem dilanjutkan kemarin. Dalam sidang kemarin dihadirkan banyak saksi, terkait teknis dan pengadaan sapi. Sempat ada debat, menurut terdakwa pengadaan sapi sudah 15 ekor. Namun dari tim teknis hanya tahu 12 ekor. Semestinya kelompok ini mesti melakukan pengadaan sapi, 85 ekor.



ARI TEJA/RADAR BALI

SIDANG SAPI: Tiga terdakwa Mangku Laba (paling kanan), Ni Made Sumertayanti (tengah putih) dan I Made Juliasa saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

SIDANG dipimpin oleh hakim Dewa Suardita, hakim anggota Petensili dan Guntur. Dengan jaksa Eca Mariartha dkk. Sedangkan terdakwa didampingi oleh pengacara Bimantara dan Ketut Bakuh.

Tiga terdakwa itu adalah Ni Made Sumertayanti, I Mangku Laba, dan I Made Juliasa. Terdakwa Ni Made Sumertayanti tidak ditahan, dengan pertimbangan sedang hamil tua. Sedangkan dua terdakwa lainnya ditahan. Saksi yang dihadirkan adalah tim teknis dan evaluasi, yaitu Putu Gede Surya Putra, I Wayan Putu Sedana, Sutriadi, Pande Panca Udayana, I Wayan Kertia, Ketut Suardita, Made Sujana, dan Made Ari Susanta ■

► Baca **Satu...** Hal 35

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015
Hal. : 21



Sambungan - - -

Hanya Ngecek Saat Beli, Selanjutnya Tak Pernah

■ SATU...

Sambungan dari hal 21

Rata-rata dari Dinas Peternakan Karangasem. Saksi menjelaskan dari dana yang didapat, mestinya kelompok yang dipimpin oleh Mangku Laba, ini membeli sapi 85 ekor. Namun, yang dibeli hanya 12 ekor. Sempat ada perdebatan, bahkan Mangku Laba mengatakan sudah membeli 85 ekor. "Ke mana dibawa sapi itu," tanya hakim Suardita. "Saya sudah *kadaskan* (kadas adalah sistem kerja sama memelihara sapi dengan pola bagi hasil) Pak hakim," ujar terdakwa.

Namun, tetap saksi mengatakan hanya ada 12 ekor. Kemudian terdakwa kembali berubah lagi, saat pembelian pertama sapi yang dibeli 15 ekor. "Memang yang berjejer 12 ekor, tiga ekor lainnya ada di tegalan," ungkap terdakwa Mangku Laba. Namun saksi pertama tetap mengatakan 12, sedangkan terdakwa 15 ekor.

Sedangkan saksi Kertia juga memastikan bahwa hanya 12 ekor membeli sapi. Lantaran polanya adalah dari kelompok sebelum membeli sapi mesti ada pemberitahuan untuk melakukan pengecekan kesehatan sapi dan sapi mesti tidak mandul. "Saya hanya sempat ngecek saat membeli sapi 12 ekor, selanjutnya tidak pernah ada pemberitahuan lagi," ujarnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, Kelompok Pucang Sari berada di Banjar Dinas Puragai, Rendang Karangasem. Perbuatan terdakwa berawal dari tahun 2011 silam.

Yanti didatangi Mangku Laba dan Julia dan menawarkan pada Yanti untuk menjadi anggota kelompok tani ternak Pucang Sari. Sebagai ketua dalam kelompok ini adalah Mangku Laba. Karena Yanti kenal, maka dia bersedia menjadi anggota kelompok.

Setelah itu, dibuat *lah* proposal untuk kegiatan penyelamatan sapi betina produktif yang proposal itu ditunjukkan pada Pemkab Karangasem dan Pemprov Bali. Proposal itu dibuat karena warga mendengar ada bansos penyelamatan sapi bali, dan jika mengajukan proposal harus ada kelompok. Nama-nama kelompok kemudian disetor oleh terakwa Julia dan Laba dengan anggota kelompok Ni Wayan Sayang, I Ketut Darma, I Nengah Sindu, I Nyoman Mamik, I Ketut Gekar, I Wayan Repek, I Wayan Margi, Nyoman Ganti, Ketut Mergeg, Mangku Neka, Wayan Misi Andyana, Wayan Tunas, Ketut Mawa, Nyoman Wage, dan Mangku Sukar.

Ternyata kelompok ini fiktif, karena memang tidak pernah ada. Nama-nama orang yang dimasukkan memang ada, namun mereka tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ikut kelompok tani Pucang Sari. Ditambah jaksa, kelompok itu sengaja dibuat oleh para terdakwa agar mendapatkan bantuan dari Pemprov Bali. Proposal itu diajukan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Karangasem oleh Julia dan Mangku Laba dan diterima oleh Gede Putu Surya Putra dan proposal ditunjukkan ke Pemprov Bali.

Setelah dilakukan verifikasi, Kadis Peternakan Karangasem memberikan rekomendasi ke Pemprov Bali, dan proposal disetujui dan akhirnya kelompok fiktif ini menerima Rp 500 juta. Uang ditransfer melalui BRI Cabang Menanga. Dan uang itu seharusnya digunakan untuk membeli 85 ekor sapi untuk dibagikan kepada kelompok, sebagaimana proposal yang dibuat. Dalam kegiatannya, yakni penyelamatan sapi betina bali, terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban lengkap dengan kuitansi. Namun sayang, aksinya

ketahuan karena setelah dicek kuitansi itu ke penjual, ternyata itu bohong belaka. Tidak ada sapi yang diberikan ke anggota. Atas perbuatan itu, negara rugi Rp 500 juta. Sedangkan ketiga terdakwa dijerat dalam Pasal 2 ayat 1 *jo* Pasal 18 ayat 1 b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dakwaan primair. Sedangkan subsidernya Pasal 3 UU yang sama. (* / yes)



Pemkab Badung Kembali Helat

FBP Ke-4 Tahun Ini

Kerja Sama Petani dengan Pengusaha Senilai Rp 8,1 Miliar

MANGUPURA - Festival Budaya Pertanian (FBP) kembali digelar tahun ini. Pelaksanannya yang akan dihelat 4-7 Juli mendatang di Kawasan Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, merupakan kegiatan yang ke-4. FBP sendiri digelar dalam rangka membangun citra Badung utara dengan memanfaatkan potensi pertanian dan keindahan alam yang eksotik dan semakin ramai dikunjungi masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan IGAK Sudaratmaja, Kamis (2/7) menyatakan, festival yang digelar kali ini tidak saja bagaimana mempromosikan potensi pertanian, tetapi yang utama adalah penginvestasian dan pengedukasian masyarakat bagaimana sektor pertanian ternyata bisa bersinergi dengan pariwisata. "Output ada di dalamnya nilai investasi, edukasi, sehingga dari kegiatan ini dapat meningkatkan daya saing Badung Utara," ucapnya.

Tahun ini FBP bertemakan

"Suksma Dresta Laksana" yang artinya "Berterima Kasih adalah Kewajiban Mulia". Menurut Sudaratmaja, tema ini merujuk pada periode berakhirnya masa jabatan Bupati Badung AA Gde Agung pada 5 Agustus 2015 mendatang.

"Kita harus mengakui bapak bupati akan meninggalkan jabatannya. Makanya tema ini diambil sebagai ucapan terima kasih. Bapak bupati berterima kasih kepada masyarakat, masyarakat berterima kasih kepada bupati," katanya. Bahkan, imbuhan Sudaratmana, tema ini juga bermakna ungkapan rasa terimakasih petani kepada alam, atas hasil panen yang mereka/petani dapat.

Lebih lanjut dikatakan, dari pengalaman tiga kali festival, pemerintah mengklaim adanya nuansa budaya pertanian yang ternyata direspon sangat positif oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pengalaman dan pengamatan di masyarakat, dimana potensi dan emosi seni masyarakat Bali, memang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang dapat dipakai untuk menawarkan ide-ide pembaharuan dan penguatan eksistensi pembangunan, khususnya pembangunan pertanian di masyarakat.

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal. : 24

Radar Bali



Sambungan - - -



ISTIMEWA

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, (DP2K) Badung IGAK Sudaratmaja, saat memberikan penjelasan terkait Festival Budaya Pertanian yang akan dihelat 4-7 Juli mendatang di Kawasan Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang.

Berkacama pada pengalaman, kata Sudaratmaja, kefiatan FBP tidak secara seremonial belaka. Sebagai bukti dari tahun ke tahun adanya perubahan respon masyarakat yang awalnya apatis menjadi semakin bergairah.

"Sekarang yang ingin ikut berjualan, maupun keterlibatan saat pembukaan festival makin meningkat," jelasnya.

Tidak itu saja, komoditi seperti sayuran asparagus, kopi, beras organik, jambu biji, jambu

kristal, jeruk, bunga kumiter, kedelai edamame, sudah semakin familiar di Badung Utara. "Bila menyebut asparagus, sekarang langsung yang disebut Badung Utara. Ini bukti bahwa FBP memberikan dampak positif," tegasnya. Selain itu pada FBP kali ini, juga akan diperkenalkan teh gumitir. Sehingga masyarakat bisa mengetahui ternyata bungan gumiter bisa jadi sulap menjadi teh humitir.

Pada lagian, walaupun baru dilaksanakan tiga kali, dan pelaksanaan tahun 2015 ini adalah kegiatan FBP ke-4, namun pemerintah pusat sudah memberikan perhatian khusus. Malah, kata Sudaratmaja, tahun 2014 lalu, FBP sudah mampu keluar sebagai "Top 99" Inovasi Pelayanan Publik, menyisihkan lebih dari 500 peserta lomba dari Kementrian, Lembaga, Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota. (advertorial/san)

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal. : 24



TANAH LOT



KETUT SUGINA/RADAR BALI

BERI MASUKAN: Sidak Banggar DPRD Tabanan di Tanah Lot kemarin.

Dewan Minta Gunakan E-Ticket

TABANAN - Anggota DPRD Tabanan mencurigai adanya kebocoran soal tiket masuk di kawasan Tanah Lot Tabanan. Untuk itu sedikitnya 16 orang anggota Badan Anggaran DPRD Tabanan sidak ke Tanah Lot, meminta pihak manajemen segera memanfaatkan teknologi E-Ticket di kawasan wisata paling favorit di Tabanan tersebut, Kamis (2/7).

Kedatangan belasan anggota banggar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tabanan I Nengah Sri Labantari itu diterima Manajer Tanah Lot I Ketut Toyo Adnyana di Wantilan Tanah Lot. Saat itu satu per satu anggota dewan memberikan masukan kepada pihak manajemen untuk meningkatkan PAD dari Tanah Lot. Ketua Fraksi PDIP, I Made Dirga misalnya pihaknya mempertanyakan mengapa yang masuk dalam APBD dari Tanah Lot hanya karcis. "Di sini saya lihat banyak restaurant, arstshop, toko dan yang lainnya," ucapnya. Hal yang sama diungkapkan oleh Gede Suadnya Dharma, I Made Asta Dharma, I Putu Desta Kumara, I Wayan Suidiana, I Made Yasa, IGN Sanjaya, I Made Sudarta, IGM Purnayasa. Intinya mereka kompak meminta pihak manajemen memanfaatkan teknologi berupa E-Tiket. "Kami sering study banding ke Borobudur, Prambanan, dan yang lainnya. Di sana kami dapat info bahwa mereka sebelumnya belajar ke Tanah Lot. Namun kini justru mereka selangkah lebih maju dan menggunakan E-Tiket," ucap Asta Dharma.

Manajer Tanah Lot I Ketut Toyo Adnyana menegaskan untuk keocoran yang ada di Tanah Lot pihaknya yakin hampir tidak ada alias sangat kecil. Karena semua pintu masuk dijaga oleh petugas tiket dan diawasi ketat oleh pecalang. "Kami sangat setuju menggunakan E-Ticket. Ini semua tergantung pada Badan Pengelola, kalau besok kami diperintahkan menggunakan E-Ticket akan kami coba, semuanya tergantung kebijakan pimpinan," sebut dia. Sedangkan soal restaurant hingga hotel semuanya ditangani dispenda. (gin/gup)

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015
Hal. : 25



Tunggakan PHR Hambat Target PAD

Pada tahun 2014 saja, tunggakan pajak hotel restoran mencapai Rp 2,4 miliar dan baru bisa dipungut di tahun 2015 ini.

SINGARAJA, NusaBali

Pencapaian target dari sektor pajak hotel dan restoran (PHR), ternyata masih sering menemui hambatan. Padahal PHR itu adalah tumpuan utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam beberapa kasus, pencapaian target PHR sering terbentur munculnya tunggakan akibat pihak pengelolaan hotel dan restoran tidak transparan dalam menyampaikan pajak. Sering pula ada faktor kesengajaan pihak pengelola hotel dan restoran tidak melunasi pajaknya. Kondisi itu hampir terjadi setiap tahun. Dan di tahun 2015, kondisi itu dikhawatirkan akan terjadi tunggakan kembali.

Dinas Pendapatan (Dispenda) Buleleng menyebut, di ta-

hun 2014 saja, tunggakan PHR mencapai Rp 2,4 miliar. Tunggakan itu baru bisa dipungut di tahun 2015. Hingga memasuki pertengahan tahun, tunggakan itu baru bisa dipungut hingga Rp 1,6 miliar. Dispenda pun janji sisa tunggakan sebesar Rp 800 juta itu bisa dipungut hingga akhir tahun 2015.

Kendati tunggakan itu bisa dipungut, namun target PHR dalam tahun berjalan tidak bisa dipastikan tercapai. Sekab Buleleng Dewa Ketut Puspaka didampingi Kepala Dispenda Ida Bagus Puja Erawan usai rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2014 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Kamis (2/7) mengatakan, pihak akan terus lakukan pendekatan dengan pengelola hotel dan restoran.

"Ini alasan klasik dan kita sudah memberi pembinaan dan menyadarkan pengusaha bahwa pajak ini bukan haknya tapi adalah titipan tamu untuk kita pungut," tegasnya. Ditambahkan, Puja Erawan, Dispenda Buleleng tetap menggenjot sosialisasi dan menyadarkan pengusaha agar bisa melunasi PHR.

Bahkan, jika kebiasaan ini terus diulangi, pemerintah daerah mer-

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal. : 13

Radar Bali



Sambungan - -



BANGGAR DPRD Buleleng dengan TAPD menggelar rapat membahas pertanggungjawaban APBD Tahun 2014 di ruang gabungan komisi

ua DPRD Buleleng I Gede Supriatna bersama anggota banggar. Sementara TAPD dipimpin oleh Sekkab Buleleng Dewa Puspaka. Sementara itu, anggota Banggar DPRD Buleleng dalam rapat kemarin lebih banyak menyoroti adanya sumber-sumber pendapatan yang belum menghasilkan sesuai rencana. Seperti diungkapkan anggota Banggar DPRD Buleleng I Gede Wisnaya Wisna. Dia mencontohkan, pungutan pajak sarang burung walet atau burung seriti yang realisasinya masih nol persen dalam tahun 2014 lalu.

Selain itu, pungutan retribusi material Golongan C yang memiliki potensi begitu besar, namun malah tidak digarap untuk menjadi pundi-pundi penopang PAD. Atas kondisi ini, dewan pun mengisratkan tahun depan kedua sektor ini dievaluasi kembali. Kalau potensi ini tidak memberikan hasil, maka disarankan untuk mengentikan saja pencantuman target PAD dalam APBD Buleleng.

"Saya kira ini patut dievaluasi kembali dan kalau memang tidak menghasilkan lebih baik dihapus saja dari alokasi APBD, biar tidak berdampak pada penilaian yang buruk terhadap pelaksanaan APBD kita," tegasnya. k19

encanakan akan menempuh jalur hukum untuk menjatuhkan sanksi dari perusahaan yang membandel. "Kita tidak memungkiri kalau di tahun ini akan ada lagi tunggakan.

Nah jangan sampai ini terjadi kita akan sadarkan mereka dan kalau masih melanggar kami akan menempuh jalur hukum," tegasnya. Rapat kemarin dipimpin Ket-

• NUSABALI/SUDIARTA

Edisi : Jumat, 3 Juli 2016
Hal. : 13